

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik global telah mempengaruhi dalam sistem internasional. Hal ini diyakini sebagai upaya Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan yang semakin besar untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasionalnya.¹ Salah satu perilaku agresif Tiongkok adalah klaim atas Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim Tiongkok atas LTS telah dimulai semenjak pengeluaran peta Tiongkok oleh pemerintahannya pada 1947.²

Konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah konflik regional yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina dengan Taiwan dan Tiongkok sebagai pihak yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut.

Sengketa ini berawal ketika Tiongkok mengklaim wilayah *nine dash lines* termasuk didalamnya kepulauan Spratly dan Paracel semenjak akhir Perang Dunia II, dimana pada saat itu Jepang menyerah dan kedua kepulauan tersebut dimasukkan ke dalam provinsi Guandong milik Tiongkok.³ Klaim Tiongkok atas wilayah ini didasari oleh faktor-faktor sejarah Tiongkok, dimana nelayan-nelayan Tiongkok semenjak tahun 200 B.C.E. sudah menggunakan perairan ini sebagai wilayah untuk mencari penghidupan, terutama di

¹ Tilman Prandt, *South Tiongkok Sea-Old Worries on The Rise*, diakses di www.e-ir.com pada 1 Juni 2016.

² Akmal, Pazli. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009-2014

³ James W. Morley, Masashi Nishihara. "*Vietnam Joins the World*". (New York:1994) M.E. Sharpe. hlm. 124.

kepulauan Paracel.⁴ Tiongkok mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut menggunakan *nine dash lines* atau dapat diartikan sebagai sembilan titik garis yang mencakup keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Klaim Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan secara *unilateral* ini ditolak oleh beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan juga Filipina dikarenakan tumpang tindih dengan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dari masing-masing negara, terutama Vietnam dan Filipina yang saling berebut dengan Tiongkok atas kepemilikan kepulauan Spratly dan Paracel.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah LTS diperkirakan sebagai motif utama klaim Tiongkok. Berdasarkan laporan *Energy Information Administration* (EIA) Amerika, Tiongkok memperkirakan terdapatnya 213 miliar barel cadangan minyak di kawasan LTS, angka ini berada pada 10 kali lipat cadangan minyak yang dipunyai oleh Amerika Serikat (AS). EIA juga memperkirakan bahwa di LTS terdapat cadangan gas alam yang sangat besar mencapai 900 triliun kaki kubik.⁵ Selain kekayaan alam, LTS juga menjadi pusat kontrol jalur transportasi laut penting di kawasan yang sangat strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia.⁶

Kawasan Laut Tiongkok Selatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai letak geografi yang sangat strategis. Sehingga, negara yang dapat mengendalikan kawasan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal geopolitik. Keunggulan dari kawasan tersebut, yang membuatnya menjadi kawasan yang begitu strategis, kawasan tersebut menjadi jalur utama dalam perdagangan energi bagi negara-negara besar di dunia, terutama di Asia. Lebih dari 90% perdagangan internasional di dunia terjadi melalui pengiriman komersial dan

⁴ Larry M. Wortzel, Robin D.S. Higham. *“Dictionary of Contemporary Chinese Military History”*. (Santa Barbara: 1999). hlm. 180.

⁵BBC Indonesia, “Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan,” diakses di http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, pada 24 April 2018.

⁶ Truong-Minh Vu, Nguyen The Phuong, *Tiongkok and South Chine Sea Disputes*, diakses di www.e-ir.com pada 24 April 2018.

sebanyak 45% melewati perairan yang tidak mempunyai aturan di Laut Tiongkok Selatan. Menariknya, Selat Malaka terletak pada salah satu ujung Laut Tiongkok Selatan, yang mana merupakan jalur internasional tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz.⁷

Faktor-faktor penting yang diuraikan diatas adalah alasan rasional yang menyebabkan wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi sengketa antara 4 (empat) negara ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei) dengan Tiongkok dan Taiwan. Pijakan hukum resmi Claimant States terhadap Laut Tiongkok Selatan khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei termasuk Indonesia juga meskipun statusnya Non Claimant State) mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen konflik di LTS, adalah sesuatu yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik⁸, dan juga konflik di LTS juga memberikan dampak terhadap kestabilan keamanan kawasan serta ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna memaksa Indonesia untuk melakukan langkah preventif demi menjaga kepentingan dan keamanan nasional Indonesia dikarenakan Kepulauan Natuna merupakan pilar perdagangan internasional dan juga adanya sumber daya alam yang melimpah di wilayah Kepulauan Natuna.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan upaya antisipasi dalam menghadapi konflik Laut Tiongkok Selatan dengan salah satunya meningkatkan Landasan Udara (Lanud) di Ranai Kepulauan Natuna. Lanud ini akan ditingkatkan dari tipe C ke tipe B. Lanud ini sendiri merupakan salah satu daerah terdepan Indonesia yang menghadap Laut Tiongkok

⁷ Rowan, Joshua P. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South Tiongkok Sea Dispute" dalam *Asian Survey* Vol. 45, no. 3. 2005. hlm. 415

⁸ Nyoman Sudira, "Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa". Jurnal Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2015

Selatan. landasan pacu diperpanjang dengan tujuan agar pesawat tempur kelas berat seperti F-16 dapat mendarat di Lanud Ranai. Sejumlah pesawat tempur direncanakan akan ditempatkan di Lanud tersebut secara bergantian.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas konflik yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) menimbulkan instabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara termasuk di wilayah Indonesia, keadaan tersebut memunculkan kewaspadaan bagi pemerintah Indonesia karena wilayah negara Indonesia terletak bersinggungan dengan daerah konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) sehingga pemerintah Indonesia menempatkan diri sebagai pihak ketiga di dalam konflik sehingga konflik tersebut tidak meluas ke wilayah perairan Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

⁹*Antisipasi Konflik Laut China Selatan, Menhan Perkuat Perbatasan Natuna, dikutip dari* <http://news.detik.com/berita/3008477/antisipasi-konflik-laut-china-selatan-menhan-perkuat-perbatasan-natuna>. diakses pada 11 Januari 2019

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk semua kalangan. Diantaranya adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang penuntut ilmu serta mampu berkontribusi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lain dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional.

2. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan Indonesia menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

1.6 Studi Pustaka

Untuk membantu pengembangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan, Rujukan pertama ialah sebuah jurnal dari E. Estu Prabowo dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI dengan judul “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Laut Tiongkok Selatan)”¹⁰ Dalam tulisan ini Estu menganggap bahwa strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi dinamika konflik di LTS belum terumuskan dengan baik. Estu mengemukakan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia masih menganggap bahwa konflik di LTS dapat diselesaikan melalui *soft power* dan tidak mengantisipasi penggunaan *hard power* yang akan berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Estu mengembangkan tulisannya dengan mengelaborasi perkembangan konflik LTS dan memperhatikan dinamika geopolitik yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya Estu menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia dengan menggunakan konsep persepsi ancaman yang terdapat secara eksplisit dalam Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010. Mengacu pada peraturan tersebut, Estu mengatakan bahwa pada

¹⁰ E. Estu Prabowo, “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Laut Tiongkok Selatan)”, Jurnal Ketahanan Nasional, No. XIX (3), Desember 2013, Hal 118-129.

saat ini terdapat dua ancaman yang tengah dihadapi Indonesia, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial.

Rujukan yang kedua ialah tulisan dari Rani Purwani Ramli dengan judul “Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna”¹¹ pada tulisan ini Rani Purwani menjelaskan tulisannya dengan latar belakang konflik laut Tiongkok selatan, dan tindakan Tiongkok yang menyatakan bahwa wilayah perairan di kepulauan Natuna merupakan wilayah yang masuk kedalam teritorial Tiongkok.

Selanjutnya Rani dalam tulisannya menggunakan konsep tentang sengketa untuk melihat bagaimana awal munculnya sengketa antara Indonesia dan Tiongkok terhadap wilayah perairan di kepulauan Natuna. Dalam tulisannya Rani juga menggunakan konsep Kepentingan Nasional dimana negara memiliki peran sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memiliki peran penting dalam dunia internasional yang akan berpengaruh bagi masyarakat di dalam negerinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karna pada tulisan Rani ini dapat membantu peneliti untuk melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Rujukan yang ketiga adalah tulisan dari Sandy Nur Ikfal Raharjo dengan judul “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan”.¹² Dalam tulisannya Sandy menjelaskan tentang potensi bahaya dari konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap keamanan di wilayah Indonesia. Dalam tulisan ini Sandy menjelaskan tentang peranan negara Indonesia dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap Laut Tiongkok Selatan, dalam tulisan ini Sandy menjelaskan bagaimana posisi negara Indonesia didalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

Untuk menganalisis tulisannya Sandy menggunakan konsep resolusi konflik sehingga penulis dapat menemukan bagaimana peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam

¹¹ Rani Purwani Ramli, “Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna, 2017

¹² Sandy Nur Ikfal Raharjo, Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan, Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan. Tulisan ini sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dengan rujukan dari tulisan ini dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Rujukan yang keempat adalah tulisan Nurul Fitri Zainia Ariffien yang berjudul “Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut Tiongkok Selatan”.¹³ Dalam penelitian ini Nurul membahas tentang bahaya potensi konflik LTS terhadap teritorial Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna. Nurul berpendapat bahwa apabila konflik LTS meluas akan membahayakan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya.

Untuk membahas dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Nurul menggunakan konsep diplomasi dan negosiasi. Namun dalam tulisannya Nurul mengatakan bahwa belum ada perundingan dengan Tiongkok terkait batas ZEE antara kedua negara. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang dirasa baik, yaitu mengusulkan draf awal kode etik (*zero draft code of conduct*) di LTS. Dan hal ini ternyata berhasil mewujudkan *Declaration on The Conduct of The Parties in The Southeast Tiongkok Sea (DoC)* pada tahun 2002.

Penelitian Nurul berakhir pada kesimpulan bahwa DoC merupakan sebuah hasil yang baik bagi usaha Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa perkembangan zaman telah melahirkan dinamika baru dalam politik Internasional. DoC yang dideklarasikan pada 2002 tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang mampu menahan tingkah laku Tiongkok di kawasan LTS. Maka dari itu, peneliti berkeinginan mendasari penelitian ini dengan melihat potensi konflik di LTS sebagai sebuah hal yang melatarbelakangi persepsi ancaman bagi Indonesia.

¹³ Nurul Fitri Zainia Ariffien, “Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut Tiongkok Selatan” e-Journal Unmul Vol 2, No. 3, 2014, hal 831-842.

Rujukan kelima adalah tulisan dari Muhammad Harry Riana Nugraha dengan judul “Perencanaan Strategis Pertahanan Masa Depan Indonesia: Analisis Pada Lingkungan Strategis Asia Tenggara (Asean) Periode 2015-2020”¹⁴ pada tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa korelasi antara kekuatan pertahanan dan peran militer dijumpai oleh suatu konsep umum berupa pola interaksi terencana yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain untuk sebuah tujuan yang hendak dicapai, yang disebut diplomasi pertahanan. Sejalan dengan pengertian tersebut, pola diplomasi pertahanan ditujukan untuk menggalang kerjasama dengan sekutu strategis atau aliansi atas dasar pertimbangan-pertimbangan real-politik dan kepentingan pertahanan nasional.

Dalam konteks Indonesia, diplomasi pertahanan dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi pertahanan yang didasarkan atas pemikiran strategis yang menempatkan kerjasama pertahanan dalam upaya perdamaian sebagai salah satu pilar untuk melindungi kepentingan pertahanan Indonesia. Tujuan penting langkah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan membangun saling percaya dengan negara lain, membangun persepsi bersama tentang masalah keamanan secara umum, dan memberikan sumbangan terhadap upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional.

Sejalan dengan konsep yang telah diuraikan di atas, dalam tulisan ini, dapat dikatakan diplomasi pertahanan Indonesia merupakan instrumen strategis dalam melakukan respons pembangunan pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada kurun waktu 2015 – 2020. Jika dilihat, sebenarnya lebih ditujukan untuk mencapai *Confident Building Measure (CBM)* dan upaya kekuatan *deterrence* daripada membangun kekuatan ofensif. Selain itu, untuk mencapai visi maritim dunia dan infrastruktur pertahanan terlengkap kawasan Asia Tenggara kebijakan tersebut dilakukan karena adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia.

¹⁴ Muhammad Harry Riana Nugraha, Perencanaan Strategis Pertahanan Masa Depan Indonesia: Analisis Pada Lingkungan Strategis Asia Tenggara (Asean) Periode 2015-2020, Vol 7, No 3 (2017)

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Pertahanan

Secara umum terdapat beberapa definisi dari diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai “*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries.*”¹⁵ Sedangkan Matsuda Yasuhiro dalam essay yang berjudul “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*” memberikan pengertian diplomasi sebagai, “*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*”¹⁶

Selain itu Mayor Laut (P) Salim dalam jurnal yang berjudul “Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan” memberikan pengertian diplomasi pertahanan sebagai tindakan “untuk saling memperkuat *confidence building measure (CBM)* dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.”¹⁷ Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer seperti pertukaran aktor pertahanan dalam rangka melakukan pelatihan bersama dengan aktor pertahanan dari negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat *confidence building measure (CBM)* dan memperkuat stabilitas kawasan.

Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang

¹⁵ Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*”, hal. 1.

¹⁶ Matsuda Yasuhiro, (2006), “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*”, hal. 3.

¹⁷ Mayor Laut (P) Salim, (2012), “Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan”, hal. 2.

dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.¹⁸ Secara operasional, kegiatan di atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun nonmateril), dan pengontrolan senjata (*arms control*).¹⁹

Terdapat tiga varian dalam perkembangan konsep diplomasi pertahanan. Pertama, diplomasi pertahanan merupakan instrumen negara untuk pengejaran kepentingan nasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional memiliki pengertian sebagai alat kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara untuk mencari teman atau aliansi. Ketiga, pada perkembangannya, diplomasi pertahanan pasca tradisional bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain untuk mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional.²⁰

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan diplomasi pertahanan pasca tradisional untuk membantu mempermudah penelitian yang akan dilakukan. Terdapat perkembangan konsep diplomasi pertahanan tradisional menuju pasca tradisional. Pergeseran konsep diplomasi pertahanan terjadi dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas (tidak hanya khusus pada pakta pertahanan). Pasca Perang Dingin, kegiatan diplomasi pertahanan tidak hanya sebatas pengaturan kerjasama antara negara anggota pakta pertahanan seperti NATO dan Warsawa, melainkan kerjasama dengan cara membangun kemitraan dengan negara bekas musuh.²¹

¹⁸ Wolfgang Koerner, "Security Sector Reform: Defence Diplomacy" (*Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament*), 17 Mei 2006.

¹⁹ United Kingdom, *Defence Diplomacy*, Ministry of Defence Policy Paper No. 1, hal 2-3.

²⁰ Idil Syawfi, *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia*

²¹ Budi Hartono, *Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian*, hal 6

Secara garis besar diplomasi pertahanan pasca tradisional bertujuan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan penciptaan stabilitas keamanan, peningkatan kemampuan pertahanan, serta kemandirian pertahanan. Dalam mencapai ketiga tujuan tersebut, keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kualitas dari upaya-upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan di tingkat bilateral, regional, dan global.²² Idil Syawfi menilai bahwa keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara dapat dinilai melalui komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan.²³ Melalui ketiga komponen tersebut, dapat dinilai bagaimana kualitas suatu negara dalam memaksimalkan instrumen diplomasi pertahanan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat tiga varian utama dari diplomasi pertahanan pasca tradisional.²⁴

- a. *Defense diplomacy for confidence building measures;*
- b. *Defense diplomacy for defense capabilities;*
- c. *Defense diplomacy for defense industry*

a. *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures (CBM)*

Diplomasi pertahanan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain bertujuan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan persepsi negatif antar negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara saling transparan dalam kebijakan khususnya dalam pengembangan kapabilitas militer, sehingga anggapan yang dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman terhadap negara lain.²⁵ Diplomasi pertahanan pada varian ini dilakukan sebagai cara untuk mencegah adanya *security dilemma* yang berakibat pada instabilitas di lingkungan regional maupun global yang pada akhirnya menimbulkan perang.

²²Andi Widjajanto, "Diplomasi Pertahanan Indonesia – AS" dikases di <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111312>

²³ Arifin Multazam, *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, hal 14

²⁴ Ibid, hal 16

²⁵ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power*, New York: Routledge, 2001, hal. 66.

Diplomasi pertahanan CBM dilakukan dalam beberapa cara seperti kerjasama militer yang merupakan simbol dari keinginan dalam menciptakan kerjasama, membangun persepsi kepentingan bersama, merubah *mindset* militer dari negara lain, serta mendukung perbaikan pertahanan suatu negara.²⁶ Keberhasilan hubungan diplomasi pertahanan yang baik dalam hal CBM akan membentuk kondisi lingkungan yang saling mempercayai antar pihak.

Secara operasional diplomasi pertahanan CBM dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, serta latihan bersama.²⁷

b. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*

Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan dilakukan dalam rangka memperkuat kapabilitas pertahanan secara material seperti alutsista dan komponen pertahanan lain. Peningkatan kapabilitas pertahanan dilakukan dalam tataran internal maupun eksternal. Pada tataran eksternal instrumen diplomasi pertahanan memiliki peran penting bagi sebuah negara dalam melakukan pembelian alutsista untuk kepentingan pertahanan dari negara importir.²⁸ Adapun diplomasi untuk kapabilitas pertahanan dilakukan melalui kerjasama strategis dalam hal bantuan militer, pembelian alutsista (kredit ekspor), pembangunan pangkalan militer, pemberian *security umbrella* yang dilakukan negara *core* ke negara *semi-phery* dan *periphery* maupun sebaliknya.²⁹ Selain itu diplomasi pertahanan pada varian ini dilakukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional.

c. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

²⁶ Andrew Cottey dan Anthony Fostrster, "Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention", dalam *Adelphi Papers*, (2004), 44: 365, New York: Routledge, hal. 15-16.

²⁷ Ibid

²⁸ Ron Matthews dan John Treddnick, *Managing the Revolution in Military Affairs* (New York: Palgrave MacMilan), hal. 1-9.

²⁹ Ibid

Diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan merupakan diplomasi yang bertujuan untuk pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. *Outcome* yang ditimbulkan dalam diplomasi ini adalah independensi politik dan ekonomi sehingga menurunkan tingkat interdependensi atau ketergantungan suatu negara dalam pengadaan alutsista. Diplomasi pertahanan pada varian ini dilakukan melalui kerjasama strategis antar negara dalam produksi senjata, kerjasama dalam pengembangan dan penelitian senjata, pemberian lisensi, investasi dalam industri pertahanan, serta transfer teknologi.³⁰

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan penulis sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan internasional.³¹

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan otensitas.³² Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis ini dipilih dengan tujuan agar penulis dapat menggambarkan dengan lebih jelas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

³⁰ Ibid

³¹ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal 2-3.

³² Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal Social Humaniora*, Vol 9 No 2 2005, hal 58.

1.8.2 Batasan Penelitian

Demi mendapatkan penelitian yang fokus dan konsisten maka penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada upaya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 2010-2015. Namun peneliti tidak menutup kemungkinan akan penggunaan data yang mendukung penelitian meskipun berada di luar jangka waktu yang ditetapkan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.³³ Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Sedangkan unit yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati adalah unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.³⁴ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Tingkat Analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.³⁵ Tingkat Analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat negara. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini peneliti melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik yang tengah terjadi di LTS.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber yang berbentuk literatur akademik berupa; buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan website. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁶ Oleh karena itu, penulis mencari data dari sumber-sumber

³³ Mohtar Mas'ood, hal 39.

³⁴ Ibid, hal 39.

³⁵ Ibid, hal 36.

³⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal 27.

sekunder yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah Indonesia menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara yang dipakai untuk menemukan dan memberi arti pada serangkaian data dalam penelitian ini.³⁷ Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada upaya pemerintah Indonesia dengan bantuan konsep diplomasi pertahanan. Melalui konsep ini diharapkan peneliti mampu untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini, diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan. Pada bab ini akan dijelaskan dinamika konflik yang terjadi di LTS. Dimulai dari sejarah, penyebab konflik, dan negara-negara yang terlibat dalam konflik yang masih terjadi sampai saat ini.

BAB III, Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Terhadap Konflik Laut Tiongkok Selatan. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana diplomasi pertahanan yang ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi konflik LTS.

BAB IV, Indonesia Sebagai Dampak Konflik di Laut Tiongkok Selatan. Pada bab ini akan menjelaskan dampak yang diterima oleh Negara Indonesia yang di timbulkan dari konflik yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan

BAB V, Penutup. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan menyatakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

³⁷ Mas'oed, Hal 9.